



RAPAT KOORDINASI NASIONAL

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)
DENGAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PROVINSI
(BAN PAUD DAN PNF PROVINSI)
TAHUN 2019**

2019

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Panduan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahap I Tahun 2019 dapat diselesaikan. Rakornas Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) Tahap I dilaksanakan untuk merancang persiapan pelaksanaan akreditasi 2019. Sesuatu yang patut disyukuri, akreditasi yang dilaksanakan BAN PAUD dan PNF kini telah menjadi kebutuhan satuan pendidikan. Akreditasi dipahami sebagai mekanisme yang efektif untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu setiap satuan PAUD dan PNF. Pada konteks ini akreditasi menjadi kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai akuntabilitas publik. Akreditasi satuan PAUD dan PNF telah berjalan sejak tahun 2008. Untuk memperkuat pelaksanaan akreditasi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Pelaksana akreditasi untuk satuan pendidikan PAUD dan PNF dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF, yaitu badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan PAUD dan PNF dengan mengacu pada standar nasional pendidikan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga mandiri ini bertugas: a) menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional; b) merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri; c) menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi; d) melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi; e) merencanakan target akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas Kementerian; f) mengevaluasi proses pelaksanaan akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi; g) membina dan mengevaluasi BAN Provinsi; h) memberikan rekomendasi atas hasil akreditasi; i) menerbitkan sertifikat hasil akreditasi kepada satuan pendidikan; j) melaporkan hasil akreditasi kepada Menteri; k) melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional; dan l) melaksanakan ketatausahaan BAN. Di tingkat provinsi, keberadaan BAN PAUD dan PNF Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF. Pembentukan BAN PAUD dan PNF Provinsi telah dilakukan secara lengkap di 34 provinsi pada 2018. Sementara Anggota BAN PAUD dan PNF periode 2018-2022 telah ditetapkan Mendikbud. Pengukuhan Anggota BAN PAUD dan PNF dilakukan Mendikbud pada tanggal 18 Januari 2018. Dalam pengarahannya, Mendikbud mengamankan BAN PAUD dan PNF untuk mengawal akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF.

Pada tahun 2018, BAN PAUD dan PNF diberi amanah mengakreditasi 30.275 satuan pendidikan PAUD dan PNF yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dengan kuota yang besar itu, sinergi BAN PAUD dan PNF bersama BAN PAUD dan PNF Provinsi sangat penting. Pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF pada 2018 dilakukan secara *online* melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). Melalui Sispena, satuan pendidikan PAUD dan PNF dapat mendaftar akreditasi secara *online*. Strategi ini dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah mengingat peningkatan kuota akreditasi tahun 2018. Dengan menggunakan Sispena, pelaksanaan akreditasi menjadi lebih mudah, praktis, cepat,

mudah, berkualitas, dan terhubung dengan unit pembina pendidikan lainnya. Sispena juga disiapkan untuk menjawab kebutuhan akreditasi satuan PAUD dan PNF yang berada di luar wilayah geografis negara Indonesia. Melalui Sispena pelaksanaan akreditasi juga dapat terhubung dengan kementerian dan lembaga lain di luar Kemendikbud yang memiliki satuan PAUD dan PNF, seperti di Kemenag. Pada tahun 2018, BAN PAUD dan PNF telah mengakreditasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di lingkungan Kemenag. Hasil akreditasi PKPPS telah diserahkan pada acara Hari Santri Nasional (HSN) yang dihadiri Presiden Republik Indonesia. Untuk persiapan akreditasi 2019, BAN PAUD dan PNF secara intensif juga menjalin komunikasi dengan Kemenag untuk menyukseskan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag.

Untuk memantapkan persiapan pelaksanaan akreditasi 2019, maka penting diadakan Rakornas Tahap I antara BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi yang dilaksanakan pada awal 2019. Apalagi Kemendikbud telah menetapkan kuota akreditasi tahun 2019 berjumlah 35.750 satuan pendidikan PAUD dan PNF. Kuota sebesar itu tentu membutuhkan persiapan maksimal dan kesepahaman dari BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF semua provinsi. Apalagi BAN PAUD dan PNF juga membuat sejumlah kebijakan baru dalam pelaksanaan akreditasi 2019. Diantara kebijakan terpenting BAN PAUD dan PNF pada 2019 adalah pergantian instrumen akreditasi dari yang lama ke yang baru. Instrumen baru ini dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Pertama instrumen yang berfungsi sebagai prasyarat akreditasi untuk menilai pemenuhan kebutuhan (*compliance*). Kedua, instrumen yang berfungsi untuk menilai performansi (*performance*) satuan PAUD dan PNF. Dengan demikian melalui Rakornas, BAN PAUD dan PNF serta BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat menyatukan langkah demi suksesnya pelaksanaan akreditasi 2019.

Pada akhirnya, BAN PAUD dan PNF menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama dan para Narasumber yang hadir dan memberikan paparan materi dalam Rakornas. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada BAN PAUD dan PNF Provinsi atas kehadiran dan partisipasi selama pelaksanaan Rakornas. Semoga semua kontribusi yang dicurahkan pada saat Rakornas menjadikan pelaksanaan akreditasi 2019 semakin mandiri, profesional, bermutu. Semoga bersamaan dengan semua ikhtiar ini, Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amin ya Rabbal 'alamin.

Jakarta, 27 Februari 2019

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
A. Pendahuluan	1
B. Struktur BAN PAUD dan PNF	3
C. Tujuan	4
D. Hasil yang Diharapkan	5
E. Pembinaan Wilayah	5
F. Pelaksanaan Kegiatan	7
G. Peserta Kegiatan	7
H. Penutup	7
I. Lampiran	8
1. Jumlah Kuota Layanan	8
2. Materi dan Narasumber	9
3. Jadwal kegiatan	11
4. Pembagian kelompok	13
5. Struktur Organisasi	16
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Pembagian Wilayah BAN PAUD dan PNF Tahun 2019	5
Tabel 2. Distribusi Alokasi Kuota Akreditasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2019	8
Tabel 3. Materi dan Narasumber	9
Tabel 4. Jadwal Kegiatan	11
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1. Struktur BAN PAUD dan PNF	2
Gambar 2. Pembagian Narasumber dan Peserta Sidang Kelompok	13
Gambar 3. Struktur Organisasi BAN PAUD dan PNF Periode 2018 - 2022	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2019

Tabel 2. Kuota Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2019

Tabel 3. Materi dan Narasumber

Tabel 4. Jadwal Kegiatan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur BAN PAUD dan PNF

Gambar 2. Pembagian Narasumber dan Peserta Sidang Kelompok

Gambar 2. Struktur Organisasi BAN PAUD dan PNF Periode 2018-2022

A. PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah sasaran akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017, misalnya, jumlah kuota akreditasi adalah 10.913 program dan/atau satuan, sedangkan pada tahun 2018 kuota akreditasi meningkat menjadi 30.275 satuan pendidikan. Berkaitan dengan perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) bahwa akreditasi yang dilakukan Pemerintah dilaksanakan oleh BAN terdiri atas BAN PAUD dan PNF untuk satuan pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Nonformal. Oleh karena itu, merubah kebijakan akreditasi yang sebelumnya melakukan penilaian pada program menjadi satuan pendidikan.

Pada tahun 2019, kuota akreditasi meningkat. BAN PAUD dan PNF dipercaya untuk dapat mengakreditasi sejumlah 35.750 satuan pendidikan. Peningkatan jumlah yang cukup signifikan ini tentu membutuhkan strategi yang tepat agar terlaksana dengan baik. Untuk mengamankan amanah kuota tersebut jelas dibutuhkan komitmen BAN PAUD dan PNF dan BAN PAUD dan PNF Provinsi. Komitmen itu penting sehingga tahapan-tahapan akreditasi dapat dilaksanakan dengan maksimal. Melalui pembahasan yang intensif telah dihasilkan sejumlah panduan BAN PAUD dan PNF. Panduan dibuat agar struktur, tugas pokok, dan fungsi sebagai Anggota BAN PAUD dan PNF dapat dipahami dengan baik. Melalui panduan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan, efektivitas, dan efisiensi dalam layanan akreditasi di 34 provinsi. Dalam pelaksanaannya, akreditasi tahun 2018 menghadapi sejumlah permasalahan terkait dengan proses pada tahapan-tahapan akreditasi. Berbagai permasalahan tersebut perlu mendapat solusi. Diantara persoalan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

Pertama, pemahaman tentang pentingnya akreditasi sebagai mekanisme penjaminan mutu satuan pendidikan PAUD dan PNF. Hingga tahun 2018, lembaga PAUD dan PNF yang terakreditasi mencapai 11,87% (PDSP-K, 2018). Disamping itu, juga masih banyak penilik/pengawas dan pengelola PAUD dan PNF yang belum memahami regulasi akreditasi, khususnya terkait mekanisme dan persyaratan pengajuan akreditasi. Padahal penilik/pengawas merupakan pihak yang bertanggung jawab sebagai pengendali mutu PAUD, keaksaraan, kesetaraan dan kursus di kecamatan yang menjadi wilayah binaannya (Permenpan dan RB Nomor 14/2010).

Kedua, perubahan kebijakan di pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Juga ada pergantian pejabat di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang membidangi PAUD dan PNF. Terutama pejabat baru hasil penataan ulang setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rata-rata pejabat belum memahami substansi dan regulasi akreditasi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Padahal konsekwensi UU No.23 Tahun 2014 berimplikasi pada pergeseran tanggung jawab pelaksanaan akreditasi dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat.

Ketiga, pada tahun 2018 dalam melaksanakan tugasnya, BAN menggunakan data yang terintegrasi dengan Kementerian. Akreditasi dilakukan dengan menggunakan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian dan *Education Management Information System (EMIS)* Kementerian Agama. Permasalahan proses akreditasi yang menyita perhatian adalah minimnya data dan dokumen akreditasi yang ada pada Dapodik. Satuan PAUD dan PNF masih banyak yang belum mengupload data dan dokumen, khususnya satuan pendidikan PAUD dan PNF di lingkungan Kemenag.

Keempat, persoalan Instrumen akreditasi. Pada tahun 2018, instrumen akreditasi masih berbasis program, sementara Kemendikbud membuat kebijakan bahwa sasaran akreditasi berbasis satuan, bukan program. Butir-butir instrumen akreditasi, baik untuk PAUD, LKP, maupun PKBM juga masih cenderung mengutamakan aspek pemenuhan standar pelayanan minimal (*compliance*), belum berorientasi pada performansi (*performance*). Persoalan terkait instrumen ini cukup menyita perhatian berdasarkan masukan *stakeholders* pendidikan. Terutama perubahan kebijakan sasaran akreditasi dari program ke satuan. Persoalan yang paling rumit terjadi pada LKP dan PKBM yang umumnya memiliki lebih dari satu program. Apalagi masing-masing program memiliki karakteristik yang berbeda.

Kelima, proses akreditasi 2018 telah dilakukan secara *online* melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). Melalui Sispena pelaksanaan akreditasi seharusnya semakin efektif, efisien, mudah, dan murah. Penggunaan Sispena juga dapat memudahkan Asesi untuk mengikuti akreditasi. Hal itu karena Asesi tidak lagi disibukkan dengan persoalan borang. Asesi dapat mengandalkan data dan dokumen yang sudah terkoneksi dengan Dapodik. Meski demikian, sejumlah Asesi masih terkendala menggunakan Sispena karena belum tersedianya layanan internet. Problem akses internet terutama di kawasan 3 T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Dalam tingkat tertentu, problem yang

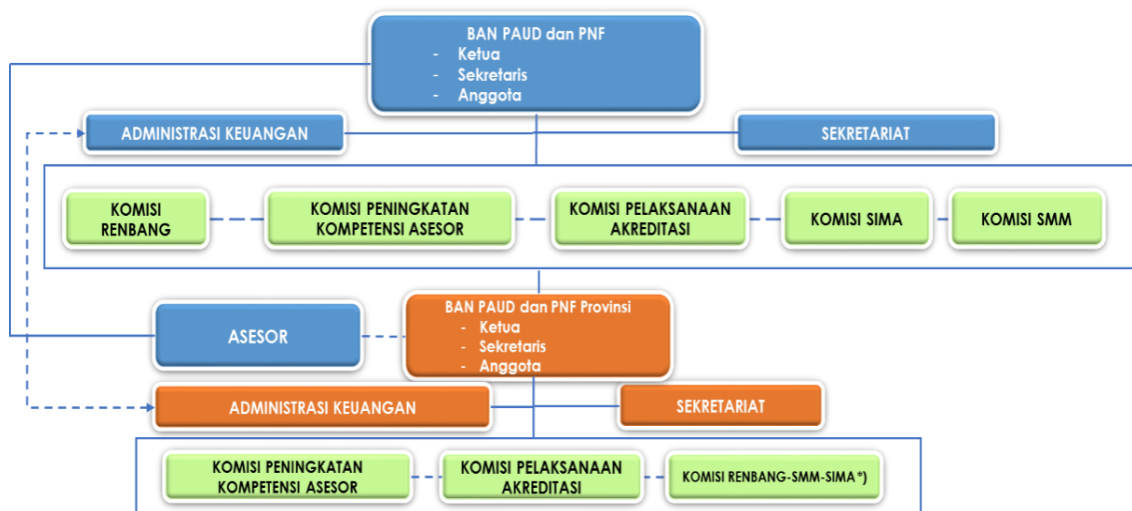
sama juga dialami BAN PAUD dan PNF Provinsi sehingga mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan akreditasi.

Keenam, tantangan kuota akreditasi tahun 2019 yang berjumlah 35.750 satuan PAUD dan PNF. Persoalan kuota yang terus meningkat jelas membutuhkan komitmen dan sinergi keluarga besar BAN PAUD dan PNF. Karena itu, perlu ada sinergi BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi, pemerintah, pembina Asesi, dan organisasi mitra dalam penyuksesan akreditasi 2019.

Sejumlah permasalahan tersebut perlu dicarikan solusi. Pada konteks itulah, kegiatan Rakornas Tahap I pada awal 2019 sangat penting dilaksanakan. Semoga Rakornas dapat meningkatkan sinergitas para pihak yang berkepentingan terhadap akreditasi BAN PAUD dan PNF. Dengan demikian, akuntabilitas mutu satuan pendidikan PAUD dan PNF dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Semua *stakeholder* harus memahami bahwa kontribusi pendidikan PAUD dan PNF sangat besar untuk menjamin kualitas generasi emas bangsa. Pada konteks inilah pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF penting dilaksanakan secara mandiri, profesional, dan bermutu.

B. STRUKTUR BAN PAUD DAN PNF

Struktur organisasi BAN PAUD dan PNF beserta perangkat pelaksana akreditasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur BAN PAUD dan PNF

Ketentuan mengenai keanggotaan dan struktur organisasi BAN PAUD dan PNF serta BAN PAUD dan PNF Provinsi mengikuti ketentuan yang ada pada Permendikbud Nomor 13

Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Berdasarkan Permendikbud ini BAN PAUD dan PNF menetapkan kembali keanggotaan 34 BAN PAUD dan PNF di Indonesia. Sebelumnya, keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi ditetapkan oleh Gubernur masing-masing Provinsi. Seiring dengan implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BAN PAUD dan PNF menetapkan kembali keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi. Penetapan keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur dan amanah Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018.

Kegiatan yang dilaksanakan di BAN PAUD dan PNF Provinsi antara lain;

I. Manajemen Akreditasi PAUD dan PNF

1. Operasional BAN PAUD dan PNF Provinsi
2. Jaringan Internet

II. Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF

1. Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF
2. Koordinasi Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF
3. Pelatihan
4. Klasifikasi Penilaian Akreditasi
5. Visitasi Akreditasi PAUD dan PNF
6. Validasi dan Verifikasi Akreditasi PAUD dan PNF
7. Supervisi Akreditasi PAUD dan PNF
8. Publikasi Hasil Akreditasi PAUD dan PNF
9. Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah

C. TUJUAN

Panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2019.

Tujuan khusus Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap I adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kebijakan, mekanisme dan penilaian akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2019;
2. Menyamakan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2019;
3. Identifikasi permasalahan akreditasi tahun 2018 sebagai *lesson learned* untuk menyukseskan pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2019;

4. Penyampaian perencanaan dan program kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2019; dan
5. Membangun sinergi antara BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi serta mitra terkait dalam rangka menyukseskan akreditasi tahun 2019.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Rakornas BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap I adalah:

1. Tersosialisasikannya kebijakan, mekanisme dan penilaian akreditasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2019;
2. Penyamaan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2019;
3. Teridentifikasi permasalahan akreditasi tahun 2018 sebagai *lesson learned* untuk menyukseskan pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2019;
4. Tersusunnya perencanaan dan program kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
5. Adanya sinergi antara BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi serta mitra terkait dalam rangka menyukseskan program akreditasi tahun 2019.

E. PEMBINAAN WILAYAH

Guna memberi bimbingan, arahan dan supervisi, maka BAN PAUD dan PNF membentuk Tim Pembina Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi. Tim Pembina Wilayah merupakan Anggota BAN PAUD dan PNF. Mereka bertugas untuk membantu pelaksanaan tata kelola administrasi dan keuangan. Tabel berikut memaparkan pembagian wilayah untuk BAN PAUD dan PNF Tahun 2019:

Tabel 1. Pembagian Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2019

No.	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
1	Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah	Sulawesi Selatan	Sumatera Barat
2	Banten	Sumatera Utara	Riau	Jambi	Lampung
3	Nusa Tenggara Timur	Aceh	Sumatera Selatan	DI Yogyakarta	Bali
4	Kepulauan Riau	Kalimantan Barat	Sulawesi Tengah	DKI Jakarta	Nusa Tenggara Barat
5	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Kep. Bangka Belitung	Bengkulu	Gorontalo

No.	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
6	Papua Barat	Sulawesi Barat	Kalimantan Selatan	Sulawesi Utara	Sulawesi Tenggara
7		Maluku	Kalimantan Tengah	Papua	Maluku Utara

Berdasarkan pembagian wilayah tersebut, BAN PAUD dan PNF menetapkan Tim Pembina setiap wilayah sebagai berikut:

Tim Pembina Wilayah I:

1. Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
2. Bahruddin
3. Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.

Tim Pembina Wilayah II:

1. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. Dr. Biyanto, M.Ag.
3. Dr. Atiyah Suharti, M. Pd.

Tim Pembina Wilayah III:

1. Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
2. Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
3. Nasrulloh, SE., M.Si. (Han)

Tim Pembina Wilayah IV:

1. Dr. Gutama, M.Pd.
2. Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
3. Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M. Sc.

Tim Pembina Wilayah V:

1. Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
2. Ade Cahyana, M. Sc.
3. Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M. Pd.

Permasalahan yang penting menjadi perhatian Tim Pembina Wilayah diantaranya adalah:

1. Manajemen organisasi BAN PAUD dan PNF Provinsi: sistem kepemimpinan kolektif kolegial, pelaksanaan tupoksi setiap Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi, hubungan kerjasama BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), hubungan kerjasama BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan

- PP/BP PAUD dan Dikmas, LPMP, Kemenag Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan unit kerja lainnya;
2. Penuntasan kuota akreditasi tahun 2019;
 3. Optimalisasi Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF dalam menyukseskan pelaksanaan akreditasi;
 4. Manajemen pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya sesuai peraturan yang berlaku.

F. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Strategi Pelaksanaan
Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dilaksanakan dalam bentuk Sidang Pleno dan Sidang Kelompok berdasarkan muatan materi yang disampaikan setiap Narasumber;
2. Tempat pelaksanaan kegiatan Rakornas di Vasa Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Mayjen HR. Muhammad No. 31, Suko Manunggal, Kota Surabaya - Jawa Timur.
3. Kegiatan Rakornas dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Minggu, 15-17 Maret 2019.

G. NARASUMBER, PESERTA DAN PANITIA

Narasumber, Peserta, dan Panitia Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF terdiri atas:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud;
3. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud;
4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud;
5. Sekretaris PAUD dan Dikmas Kemendikbud;
6. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Anggota BAN PAUD dan PNF;
8. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF;
9. Sekretariat BAN PAUD dan PNF
10. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi;
11. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
12. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi yang membidangi SIMA.

H. PENUTUP

Demikian Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap I ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan Rakornas berjalan dengan baik, sukses, dan lancar sehingga menghasilkan rumusan yang terbaik untuk pelaksanaan akreditasi tahun 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuota Layanan Akreditasi

Kuota layanan akreditasi tahun 2019 mencapai 35.750 satuan pendidikan PAUD dan PNF. Secara terinci sebaran kuota akreditasi BAN PAUD dan PNF di 34 Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Kuota Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2019

No.	Provinsi	Kuota Akreditasi Tahun 2019
1.	Aceh	500
2.	Sumatera Utara	1.250
3.	Sumatera Barat	1.300
4.	Riau	1.500
5.	Kepulauan Riau	300
6.	Jambi	800
7.	Sumatera Selatan	800
8.	Kepulauan Bangka Belitung	300
9.	Bengkulu	500
10.	Lampung	1.050
11.	Banten	1.000
12.	DKI Jakarta	800
13.	Jawa Barat	5.000
14.	Jawa Tengah	4.000
15.	D.I. Yogyakarta	750
16.	Jawa Timur	6.000
17.	Bali	500
18.	Nusa Tenggara Barat	1.000
19.	Nusa Tenggara Timur	600
20.	Kalimantan Barat	700
21.	Kalimantan Tengah	600
22.	Kalimantan Timur	500
23.	Kalimantan Selatan	600
24.	Kalimantan Utara	150
25.	Sulawesi Utara	500
26.	Gorontalo	600
27.	Sulawesi Tengah	400
28.	Sulawesi Barat	400
29.	Sulawesi Selatan	1.600
30.	Sulawesi Tenggara	750
31.	Maluku	300
32.	Maluku Utara	350
33.	Papua	200
34.	Papua Barat	150
JUMLAH		35.750

Lampiran 2: Materi dan Narasumber

Materi dan Narasumber Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2019 Tahap I adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Materi dan Narasumber

No	Topik	Narasumber
1	Kebijakan Kemendikbud tentang Akreditasi PAUD dan Dikmas	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kebijakan Dirjen PAUD dan Dikmas dalam penguatan dan pemanfaatan hasil akreditasi	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas
3	Meningkatkan performa PAUD dan PNF melalui proses akreditasi	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
4	Fasilitasi Balitbang dalam pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
5	Sinergitas Pemetaan Mutu Ditjen PAUD DIKMAS dengan akreditasi PAUD dan PNF	Sekretaris Dirjen PAUD dan Dikmas
6	Data pokok Pendidikan PAUD dan PNF untuk akreditasi tahun 2019	Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
7	Kebijakan, Mekanisme, dan strategi Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2019	Ketua BAN PAUD dan PNF
8	Tata Kelola BAN PAUD dan PNF	Sekretaris BAN PAUD dan PNF
9	Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA)	Komisi SIMA BAN PAUD dan PNF
10	Perencanaan program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi	Tim Pembina Wilayah BAN PAUD dan PNF
11	Simulasi EDS-PA	Tim Komisi SIMA, Tim Ahli dan Staff Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Sidang Pleno

- Materi I : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kebijakan Kemendikbud tentang Akreditasi PAUD dan Dikmas
- Materi II : Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud
Kebijakan Dirjen PAUD dan Dikmas dalam penguatan dan pemanfaatan hasil akreditasi
- Materi III : Kabalitbang Kemendikbud
Meningkatkan performa PAUD dan PNF melalui proses akreditasi

- Materi IV : Sesbalitbang Kemendikbud
Fasilitasi Balitbang dalam pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF
- Materi V : Sesditjen Dikmas
Sinergitas Pemetaan Mutu Ditjen PAUD DIKMAS dengan akreditasi PAUD dan PNF
- Materi VI : Kapus PDSP-K
Data pokok Pendidikan PAUD dan PNF untuk akreditasi tahun 2019
- Materi VII : Ketua BAN PAUD dan PNF
Kebijakan, Mekanisme, dan strategi Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2019
- Materi VIII : Sekretaris BAN PAUD dan PNF
Tata Kelola BAN PAUD dan PNF
- Materi IX : Komisi SIMA BAN PAUD dan PNF
Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA)

Sidang Kelompok

- Materi X : Tim Pembina Wilayah BAN PAUD dan PNF
Perencanaan program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi
- Materi XI : Tim Komisi SIMA, Tim Ahli, dan Staff Sekretariat BAN PAUD dan PNF
Simulasi EDS-PA

Lampiran 3: Jadwal Kegiatan

Tabel 4. Jadwal Kegiatan

Hari Pertama, Jumat, 15 Maret 2019

No	Waktu	Kegiatan	Pembicara	Moderator
1	14.00 – 18.00	Check-in dan Registrasi	Panitia	Panitia
2	18.00 – 19.00	Makan Malam	Panitia	Panitia
3	19.00 – 20.00	- Pembukaan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Pembacaan Do'a	- MC - (Video Lagu Indonesia Raya) - Dr. Habiburrahman, M.Pd.	
		- Laporan Panitia Rakornas	Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M. Sc.	MC
		Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF Sambutan dan Pengarahan Mendikbud sekaligus membuka acara Rakornas	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.Pd.	MC MC
4	20.00 – 21.00	Paparan Dirjen PAUD & Dikmas	Ir. Harris Iskandar, Ph.D.	Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
5	21.00 – 22.00	Paparan Kabalitbang	Ir. Totok Suprayitno, Ph.D.	Bahrudin
6	22.00	Istirahat		

Hari Kedua, Sabtu, 16 Maret 2019

No	Waktu	Kegiatan	Pembicara	Moderator
1	08.00 – 09.00	1. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN PAUD dan PNF 2. Tata Kelola BAN PAUD dan PNF	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.	Dr. Firman Hadiansyah
2	09.00 – 11.15	1. Fasilitas Balitbang dalam pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF 2. Sinergitas pemetaan mutu BP PAUD DIKMAS dengan akreditasi PAUD dan PNF 3. Data pokok Pendidikan PAUD dan PNF untuk akreditasi tahun 2019	Ir. Dadang Sudiyarto, MA. Dr. Wartanto, M.M. Dr. Bastari, MA.	Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M. Sc.
3	11.15 – 12.00	Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA)	Ade Cahyana, M. Sc.	Dr. Biyanto, M.Ag.
4	12.00 – 13.30	Istirahat dan Makan Siang	Panitia	Panitia

No	Waktu	Kegiatan	Pembicara	Moderator
5	13.30 – 16.00	Sidang Kelompok: 1. Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi 2. Sekretariat (Staff-SIMA) BAN PAUD dan PNF Provinsi	Tim Pembina Wilayah dan Penanggung jawab	Sekretariat dan Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
6	16.00 – 17.00	Perumusan Rekomendasi Kelompok	Tim Perumus dan Notulen yang ditugaskan	Tim Perumus dan Notulen yang ditugaskan
7	17.00 – 19.30	Istirahat, Makan Malam	Panitia	
8	19.30 – 21.30	Sidang Pleno diikuti Ketua, Sekretaris dan Sekretariat BAN-P (Staff-SIMA) Presentasi Hasil Sidang Kelompok: Perencanaan program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF tahun 2019	Ketua dan Sekretaris Kelompok	Anggota BAN PAUD dan PNF
9	21.30	Istirahat		

Hari Ketiga, Minggu, 17 Maret 2019

No	Waktu	Kegiatan	Pembicara	Moderator
1	08.00 – 10.00	Penyampaian rumusan Hasil Rakornas dan Rencana Tindak Lanjut	Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M. Sc.	Dr. Nugaan Yulia Wardhani S.
2	10.00 – 12.00	Penutupan Ketua BAN PAUD dan PNF	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.	MC
3	12.00 – Selesai	Administrasi dan <i>Check Out</i>	Panitia	Panitia

Lampiran 4: Pembagian Kelompok

Sidang Kelompok

Peserta dibagi menjadi enam Kelompok. Lima kelompok sesuai wilayah pembinaan masing-masing terdiri atas Ketua, Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi. Sedang satu kelompok khusus sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi (Staff-SIMA) dari setiap provinsi.

Dalam sidang kelompok, setiap provinsi menyampaikan perencanaan program dan kegiatan beserta strategi implementasinya berdasarkan kuota akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF tahun 2018. Sementara anggota BAN PAUD dan PNF Pembina Wilayah menugaskan Notulen dan Tim Perumus untuk mendokumentasi dan merumuskan jalannya sidang kelompok. Hasil rumusan akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok pada saat sidang pleno. Sedang kelompok sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi (Staff-SIMA) melakukan simulasi EDS-PA didampingi Tim Ahli dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF.

Topik pembahasan sidang kelompok ketua dan sekretaris:

1. Penguatan tata kelola BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2019;
2. Perencanaan program dan kegiatan akreditasi tahun 2019.

Topik pembahasan sidang kelompok komisi SIMA:

1. Simulasi Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA)
2. Manajemen database EDS-PA

Pembagian Narasumber dan Peserta Sidang Kelompok:



Gambar 2. Pembagian Narasumber dan Peserta Sidang Kelompok

Sidang Kelompok I

Narasumber Kelompok I

1. Dr. Nugaan Yulia Wardhani S
2. Bahruddin
3. Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
4. Subhan Dika, S.Stat. (Sekretariat)
5. Sarwoto, S.Pd.I. (Sekretariat)

Peserta Kelompok 1

Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Jawa Timur
2. Banten
3. Nusa Tenggara Timur
4. Kepulauan Riau
5. Kalimantan Timur
6. Papua Barat

Sidang Kelompok II

Narasumber Kelompok II

1. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. Dr. Atiyah Suharti, M.Pd.
3. Afriyanto Subekti, S.S.I (Sekretariat)
4. Dian Rahadiansyah, S.Pi. (Sekretariat)

Peserta Kelompok II

Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Jawa Barat
2. Sumatera Utara
3. Aceh
4. Kalimantan Barat
5. Kalimantan Utara
6. Sulawesi Barat
7. Maluku

Sidang Kelompok III

Narasumber Kelompok III

1. Dr. Firman Hadiansyah
2. Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
3. Nasrulloh, SE., M.Si. (Han)
4. Fera Hendra (Sekretariat)
5. Rini Suci W., A.Md.(Sekretariat)

Peserta Kelompok III

Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Jawa Tengah
2. Riau
3. Sumatera Selatan
4. Sulawesi Tengah
5. Bangka Belitung
6. Kalimantan Selatan
7. Kalimantan Tengah

Sidang Kelompok IV

Narasumber Kelompok IV

1. Dr. Gutama, M.Pd.
2. Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
3. Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
4. Arman, S.IP. (Sekretariat)
5. Shella, S.Pd.

Peserta Kelompok IV

Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Sulawesi Selatan
2. Jambi
3. D.I. Yogyakarta
4. DKI Jakarta
5. Bengkulu
6. Sulawesi Utara
7. Papua

Sidang Kelompok V

Narasumber Kelompok V

1. Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
2. Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd.
3. Alfiannor Luthfi Hasain, S.Psi., M.Si. (Tim Ahli)
4. Endang Purwaningsih (Sekretariat)

Peserta Kelompok V

Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Sumatera Barat
2. Lampung
3. Bali
4. Nusa Tenggara Barat
5. Gorontalo
6. Sulawesi Tenggara
7. Maluku Utara.

Sidang Kelompok VI

Narasumber Kelompok VI

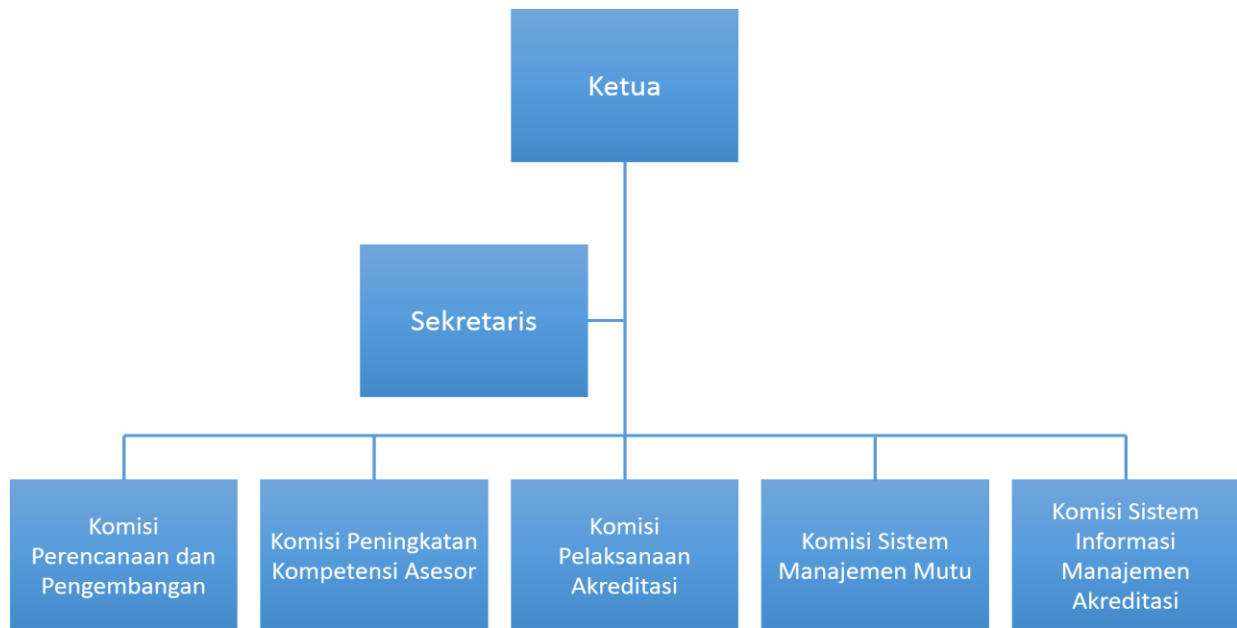
1. Ade Cahyana, M.Sc.
2. Dr. Biyanto, M.Ag
3. M. Najib, S.Kom. (Tim Ahli)
4. Taufik Aji Sumirat, SE. (Tim Ahli)
5. Rani Andriani, S.Si., M.Stat. (Tim Ahli)
6. Jaka Aulia Pratama, S.Si., M.Stat. (Tim Ahli)

Peserta Kelompok VI

Sekretariat BAN-P (Staff-SIMA) dari 34 Provinsi

Lampiran 5: Struktur Organisasi BAN PAUD dan PNF

Struktur organisasi BAN PAUD dan PNF periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi BAN PAUD dan PNF Periode 2018-2022

1. **Ketua** : Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. **Sekretaris** : Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
3. **Komisi Perencanaan dan Pengembangan**
 - Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
 - Dr. Nugaan Yulia Wardhani S.
4. **Komisi Pelaksanaan Akreditasi**
 - Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
 - Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
 - Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
5. **Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor**
 - Dr. Gutama, M.Pd.
 - Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
 - Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
 - Bahruddin
6. **Komisi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi**
 - Ade Cahyana, M.Sc.
 - Dr. Biyanto, M.Ag.
7. **Komisi Sistem Manajemen Mutu**
 - Dr. Firman Hadiansyah.
 - Nasrulloh, S.E., M.Si. (Han) .



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id